BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN

NOMOR 3A TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 27 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT KUOTA, NON KUOTA DAN JAMINAN PERSALINAN DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2562/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan yang telah ada;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Kuota, Non Kuota dan Jaminan Persalinan di Puskesmas dan Jaringannya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/Menkes/Per/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
17. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 41 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 10 Seri D);
18. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Kuota, Non Kuota dan Jaminan Persalinan di Puskesmas dan Jaringannya (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2011 Nomor 23 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 27 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT KUOTA, NON KUOTA DAN JAMINAN PERSALINAN DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Kuota, Non Kuota dan Jaminan Persalinan di Puskesmas dan Jaringannya pada Bab V huruf E angka 3 diubah sehingga angka 3 berbunyi sebagai berikut :

3. Biaya Persalinan
   a. biaya pemeriksaan kehamilan (ANC) dan pelayanan nifas (PNC) maksimal 4 (empat) kali dengan tarif setiap pemeriksaan sebesar Rp. 20.000,00.
   b. biaya Persalinan normal sebesar Rp. 500.000,00 setiap persalinan dengan rincian :
      1) retribusi sebesar Rp. 15.000,00 ; dan
      2) jasa pelayanan persalinan sebesar Rp. 485.000,00.
   c. biaya jasa pemasangan suntik KB pasca melahirkan dengan tarif sebesar Rp. 10.000,00.
   d. biaya jasa pemasangan IUD/Implant dengan tarif sebesar Rp. 60.000,00.
   e. biaya penanganan komplikasi KB pasca persalinan dengan tarif sebesar Rp. 100.000,00, dengan rincian :
      1) retribusi sebesar Rp. 25.000,00 setiap specimen; dan
      2) jasa pelayanan kesehatan sebesar Rp. 75.000,00.

f. pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal dengan komplikasi sebesar Rp. 150.000,00 setiap pelayanan.

g. pelayanan tindakan pasca persalinan (Manual Plasenta) sebesar Rp. 150.000,00 setiap pelayanan.

h. pelayanan pasca keguguran, persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar sebesar Rp. 650.000,00 setiap persalinan dengan rincian :

   1) retribusi sebesar Rp. 60.000,00; dan

   2) jasa pelayanan kesehatan sebesar Rp. 590.000,00.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 10 Januari 2012

BUPATI PAMEKASAN,

KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 10 Januari 2012

Plt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

HERMAN KUSNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2012 NOMOR 2A SERI E